

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai sumber lainnya, perkembangan inflasi di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan tren yang terkendali, bahkan menjadi yang terendah di Provinsi Sulawesi Utara pada periode tertentu di tahun 2025. Pada bulan September 2025, Kabupaten Minahasa Selatan mengalami inflasi tahunan (y-on-y) sebesar **1,04%**. Angka ini merupakan yang terendah di Provinsi Sulawesi Utara.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Meskipun inflasi di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan tren yang terkendali pada tahun 2025, khususnya dengan pencapaian inflasi terendah di Sulawesi Utara pada bulan Agustus dan September, ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam upaya pengendalian inflasi, terutama jika mengacu pada gejolak inflasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya;

1. Ketergantungan pada komoditas tertentu
2. Permasalahan distribusi dan logistic
3. Faktor eksternal yang tidak terkendali
4. Tantangan kelembagaan dan struktural
5. Permasalahan pada tahun sebelumnya (2024) yaitu ketidakstabilan pasokan dan lonjakan permintaan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada Triwulan ke III ini terus melaksanakan 9 (sembilan) Langkah Konkrit yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat dalam menjaga kestabilan inflasi. Langkah-langkah tersebut ialah:

1. Monitoring pasokan pasar menjelang "pengucapan syukur" pada Bulan Juli 2025
2. Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah
3. Kelanjutan Gerakan "Marijo Batanam"
4. Menjaga ketersediaan pasokan dengan menanam rica dilahan BPP bersama petani dan POPT
5. Mengikuti Rakornas bersama Kemendagri dan Rapat TPID Kabupaten Minahasa Selatan

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan yang diterapkan berhasil membawa Minahasa Selatan mencapai inflasi terendah di Sulawesi Utara pada Agustus dan September 2025. Ini menunjukkan efektivitas kebijakan dalam menekan laju kenaikan harga secara signifikan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Optimalisasi peran TPID hingga tingkat desa: Tingkatkan sinergi antara TPID kabupaten dengan pemerintah desa. Libatkan kepala desa dalam pemantauan harga di wilayahnya dan manfaatkan Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan lokal.